TUGAS : INDIVIDU
MATA KULIAH : HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DOSEN PENGAMPUH : PROF. DR. ABDULLAH MARLANG, S.H.,M.H.

Judul :

**PERBANDINGAN SUBTANSI UNDANG UNDANG ZAKAT
ANTARA
Nomor 38 TAHUN 1999 DAN Nomor 23 Tahun 2011**

Oleh: PATAWARI

NP. 400311409B

**MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
ILMU HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
7/28/2012**

**PERBANDINGAN SUBTANSI UNDANG UNDANG ZAKAT
ANTARA
Nomor 38 TAHUN 1999 DAN Nomor 23 Tahun 2011**

A. MUKADDIMAH

Zakat adalah pilar ketiga dari lima pilar Islam. Dalam al-Qur'an perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah shalat, menunjukkan betapa pentingnya zakat. Ibarat dua sisi mata uang, shalat dan zakat merupakan simbol kebajikan hakiki yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Shalat tanpa zakat ibarat joki tanpa kuda tunggangan. Zakat tanpa shalat ibarat kuda tanpa joki yang menungganginya. Namun, pengaturan terperinci mengenai zakat tidak diatur dalam al-Qur'an melainkan diputuskan sendiri oleh Nabi. Selanjutnya perintah umum al-Qur'an dan ketentuan terperinci dari Rasulullah dijadikan landasan bagi umat Islam dalam menjalankan perintah zakat dari masa ke masa. Selama enam abad sejak dilembagakan oleh Nabi Muhammad SAW, zakat telah memainkan perannya sebagai pilar Islam yang menyangga keseimbangan sosial umat Islam. Fungsi sosial zakat paling tidak berhasil diwujudkan oleh generasi awal Islam hingga mengalami kemerosotan pada abad-abad ke-12 dan 13 Masehi.

Di masa pemerintahan khalifah Abu bakar As-Shiddiq, beliau pernah mengeluarkan ultimatum untuk memerangi siapa saja yang enggan mengeluarkan zakat, begitu pentingnya perintah zakat,

sampai-sampai pada masa itu orang yang tidak mengeluarkan zakat disamakan dengan orang yang murtad.

Perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang ini, tidak bisa dipisahkan dari peran penting zakat sebagai penyokong dakwah dan perjuangan, bahkan zakat termasuk bagian dari roda perkonomian dalam Islam. Kesenjangan antar sesama ummat pun dibentuk melalui hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima zakat.

Perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang ini, tidak bisa dipisahkan dari peran penting zakat sebagai penyokong dakwah dan perjuangan, bahkan zakat termasuk bagian dari roda perkonomian dalam Islam. Kesenjangan Setiap kita tentunya hidup dalam kondisi ekonomi yang berbeda, ada yang hidupnya berkecukupan untuk dirinya, keluarga dan orang lain. Ada yang pas-pasan untuk dirinya dan keluarganya saja, ada juga yang hidupnya serba tidak berkecukupan. Rasanya sikap saling berbagi perlu terus kita bina melalui zakat, sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rezeki kepada kita.

Sikap peduli antar sesama juga lahir berkat kewajiban zakat ini, orang-orang kaya tergerak hatinya untuk memberi dan menyantuni fakir miskin dan kaum dhuafa, sehingga strata sosial dan dinding pemisah diantara mereka akan hilang dengan sendirinya.

Ada pesan tersirat pada zakat, mengingatkan kehidupan kita yang fana ini, diri kita, harta kita, kehidupan kita, semuanya hanyalah milik Allah semata, kita tidak punya apa-apa jikalau Allah SWT tak menitipkannya kepada kita, harta dan kehidupan yang sifatnya hanyalah pinjaman, ketika Allah menagihnya tak ada alasan bagi kita untuk tidak mengembalikannya.

Secara bilangan dan kasat mata, mungkin ketika berzakat harta kita akan berkurang, tapi yakinlah sebenarnya kita telah melakukan investasi yang besar, investasi yang kekal selamanya di sisi Allah, dengan keuntungan berlipat ganda dan tidak pernah ada istilah rugi.

Rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk enggan berzakat, sebab semua yang kita punya ini adalah milik Allah SWT. semata. Islam agama *rahmatat lil 'alamin*. Apapun yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. melalui kalam-Nya, semuanya untuk kebaikan kita sendiri.

Sudah saatnya kita bisa meniru Kaum Anshar yang begitu tinggi kepeduliannya terhadap kaum Muhajirin, dimana mereka siap menerima, membela, memberi perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang berhijrah dengan tanpa mengharapkan imbalan selain balasan pahala dari Alloh. Mereka adalah orang-orang Madinah yang telah masuk ke dalam islam dan menerima kedatangan kaum Muhajirin yang berhijrah ke tempat mereka.

Begitu istimewanya sehingga kedua kelompok ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan penghargaan dan jaminan yang tertinggi, serta ridha Allah dan surga-Nya yang abadi. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat ke 100: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan *Muhajirin* dan *Anshor* dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar".

Kaum anshar selalu menerima dan mau berkorban untuk kaum muhajirin dan bahkan mereka bersedia dipersaudarakan dengan kaum muhajirin. Seperti Abdur Rahman bin Auf (kaum muhajirin) dipersaudarakan dengan Saad bin Rabi' (kaum Anshar). Dengan persaudaraan tidak ada perbedaan seperti nasab, warna kulit, asal daerah ataupun kebangsaannya.

Dengan persaudaraan itu maka perjuangan kaum anshar sangat besar terhadap pertolongan kaum muhajirin dan perkembangan islam yang berkelanjutan. Setelah terbentuk persaudaraan antara muhajirin dan anshar, maka kerjasama dan tanggung jawab dipikul bersama-sama.

Kaum anshar merupakan kaum yang menolong kaum muhajirin yang berdomisili di Madinah. Kaum Muhajirin sewaktu

hijrah ke Madinah tidak membawa bekal yang cukup, apalagi memiliki rumah. Dengan pertolongan kaum Anshar, kaum Muhajirin dapat hidup dengan layak.

Kaum anshar sangat menghargai dan menghormati kaum muajirin. Kaum muhajirin yang datang dan menumpang ke keluarga anshar diterima dengan baik dan malah diberi sebagian hartanya, kaum muhajirin pun sangat menghargai keikhlasan kaum anshar.

Sikap suka menolong merupakan ajaran yang harus kita teladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tolong menolong dapat terbina persatuan dan persaudaraan sesama kita. Fanatisme kesukuan, perbedaan ras, rasa kedaerahan dan lain sebagainya dapat dihindarinya.

B. Dasar hukum

Peraturan yang Mengatur Zakat

1. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Kelebihan Undang-undang No. 38 Tahun 1999

Dengan adanya Undang-undang no.38/1999 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan pembentukan Badan Amil Zakat dengan semua tingkatannya (pasal 6) dan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Hal tersebut menjadikan zakat semakin mudah diajngkau bagi masyarakat luas. Kemudian UU No.38/1999 juga memuat sanksi yang jelas bagi para amil zakat yang melakukan penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengumpul serta penyalur zakat. Hal ini dapat menjadikan umat Islam bertambah kepercayaannya dalam membayar zakat.

D. Kekurangan

Asas equality (persamaan) antara mustahik-muzakki (orang yang berhak zakat dan wajib zakat). Dalam pasal 21 UU Zakat, Amil Zakat yang statusnya sebagai mustahik dikenakan sanksi dengan hukuman pidana kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar 300 juta. Sementara muzakki ditempatkan sebagai yang tidak dapat sanksi dan hanya jika melaporkan daftar kekayaannya (pasal 14 ayat 1-2). Artinya, muzakki yang secara syariah diwajibkan dan secara sosial agar sadar atas realitas

kemiskinan, seolah diberi hati oleh UU Zakat –untuk tidak menyebutnya dilindungi. Padahal keduanya merupakan objek hukum yang harus ditempatkan sama di hadapan hukum sebagaimana lainnya ada pada peraturan perundangan.

Ketentuan dalam UU No. 38/1999 dan UU No. 17/2000 terasa kontradiktif dalam masalah relasi pajak dan zakat. Dalam pasal 14 ayat 3 dinyatakan “zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku”. Jadi, zakat dapat mereduksi semua harta muzakki. Di pasal 9 huruf g UU No. 17/2000 hanya ditentukan reduksi zakat atas penghasilan kena pajak. Artinya, relasi dua UU ini melahirkan asumsi : apakah perubahan UU Zakat disesuaikan ke UU Pajak? UU Pajak diamandemen dan disesuaikan dengan UU Zakat? dan atau keduanya harus diamandemen disesuaikan salah satu dengan lainnya. Idealnya, berzakat dapat mengurangi semua beban pajak seperti di Malaysia dan atau mengurangi kewajiban pajak layaknya di Saudi Arabia.

Masalah pemusatan pengelolaan zakat pada satu badan yang lebih dikenal dengan istilah Central of LPZ. Yang diyakini, kemungkinan direpresentasikan oleh sosok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sudah terbentuk belakangan ini. Basis

argumen pembuatan BAZNAS dialamatkan pada tafsiran normatif-otentik, bahwa yang berhak memaksa adalah otoritas negara (pemerintah). Hanya saja di tengah kepercayaan yang belum terbentuk secara kuat dan rapih, maka inisiatif ke arah itu tidak mustahil mengundang nada kritisisme. Ironisnya, secara faktual-institusional telah hadir di lapangan sosok Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), seperti Dompot Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat dan lainnya. Lalu, apa yang akan dilakukan? peleburan institusi zakat ke BAZNAS atau penggabungan lainnya “marger bank”.

Sistem informasi dan tata kelola zakat yang belum memadai sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya.

Secara kelembagaan pengelolaan zakat terdapat dua masalah, yakni di satu sisi akan dipusatkan di Baznas dan di sisi lain diberikan izin berdirinya lembaga pengelola zakat yang independen.

E. Beberapa pasal-pasal krusial dalam UU No 23 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 17. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan :

BAZ & LAZ menyikapi peluang yang muncul dari kelahiran UU 38 1999, bagaimana capaian yang berhasil ditorehkan oleh BAZ dan Z dan LAZ. Tulisan tersebut melengkapi tulisan pertama yang menjelaskan ‘revolusi zakat’ di Indonesia sebagai manfaat UU 38 1999 selama 10 tahun terakhir.

Selain itu, juga dijelaskan perbedaan sangat kinerja BAZ dan LAZ. Meskipun Kepri, Jakarta dan Sul-Sel sebagai contoh menampilkan sosok yang berbeda, secara umum BAZ

Propinsi/Kabupaten/Kota masih harus bergulat melepaskan diri dari hambatan internal dan tertinggal jauh dibanding LAZ. Hambatan itu lebih pada cara pandang tentang posisi dan peran yang seharusnya dimainkan oleh BAZ.

Segi Pengelolaan

Sebagian dari pasal-pasal dalam UU 23 2011 hasil amandemen UU 38 1999 yang menjadi titik sentral ‘pergulatan’ antara LAZ dengan pemerintah (Kemenag) selama proses amandemen UU 38 1999 sepanjang tahun 2009 – 2011.

UU 23 2011 menempatkan pemerintah melalui BAZNAS (Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai pengelola tunggal zakat di Indonesia dengan fungsi perencanaan-pengendalian-pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sementara itu, LAZ diposisikan sebagai ‘pembantu’ BAZNAS.

Wacana pengelolaan tunggal zakat oleh Negara adalah hal yang menggembirakan. Tidak saja ini merujuk kepada banyak Nash dan Hadist yang menjelaskan zakat adalah domain pemerintah, namun juga karena pada akhirnya pengelola zakat memiliki sumber-sumber daya yang lengkap untuk memastikan pengelolaan zakat mencapai tujuannya.

Tata kelola LAZ yang terbukti lebih baik dibanding BAZ, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. LAZ tidak

memiliki akses terhadap tata ruang dan menjadi tak berdaya menghadapi pengusuran usaha dhuafa yang dibiayainya. LAZ tidak memiliki akses pada anggaran sosial dan kesehatan, sehingga seringkali hanya membantu ala kadarnya.

LAZ harus mengeluarkan begitu banyak energy untuk meyakinkan muzakki tentang akuntabilitas program, mengalokasikan sumberdaya berharga untuk ambulance, mobil jenazah dan bis pelajar. Juga mengalokasikan dana besar untuk biaya sekolah dhuafa di institusi swasta, biaya masuk sekolah, buku paket dan seragam sekolah.

Hal-hal tersebut dan banyak hal lainnya sesungguhnya adalah sumberdaya yang tersedia di Negara. Maka bila pengelolaan zakat berada di Negara, pemerintah dapat menggunakan wewenangnya untuk alokasi sumberdaya diatas, sehingga zakat yang masih belum seberapa dapat fokus pada sisi-sisi yang lebih mendasar dan strategis.

Pemerintah memiliki organ perencanaan hingga audit keuangan yang dapat dilibatkan sehingga perencanaan dan pengendalian lebih baik dan utuh. Pengelolaan zakat dibawah 'satu pintu' akan membuka peluang zakat dikelola sebagai sesuatu yang integral, utuh dan dengan sumberdaya yang menyeluruh.

Partisipasi Masyarakat

Rumusan akhir pasal-pasal UU hasil amandemen yang menyentakkan pengelola LAZ memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diatur agar ‘tidak dapat bersebarangan’ dengan tujuan pengelolaan tunggal. Penyusun draft memahami bahwa ‘peluang yang sama besar’ seperti pada UU 38 1999 menimbulkan kesulitan bagi proses ‘pengendalian’.

Masyarakat melalui LAZ ditempatkan sebagai supporting dari keseluruhan proses. UU mengatur dengan rinci pembentukan dan pengelolaan BAZNAS disemua tingkatan, sementara pembentukan LAZ diatur dalam satu pasal, berlaku umum dengan tidak menyebutkan adanya tingkatan.

Partisipasi dalam bentuk pengelolaan harus memenuhi serangkaian prosedur yang secara teknis memastikan hadirnya akuntabilitas. Implikasinya, meski dimungkinkan, akan ada ‘seleksi’ untuk memperoleh izin mendirikan LAZ. LAZ juga berhubungan dengan BAZNAS dalam hampir seluruh aspek operasional, utamanya pembentukan dan pelaporan.

UU juga menegaskan manfaat partisipasi masyarakat. Seluruh zakat yang dibayarkan kepada akan mengurangi

penghasilan kena pajak, berdasarkan resi yang diterima dari BAZNAS atau LAZ.

Implikasi Teknis

Perubahan posisi pengelola berpotensi menimbulkan implikasi teknis yang tidak sederhana. Pasal 41 misalnya, mengancam kurungan 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 50jt bagi setiap individu yang menjalankan fungsi amil tanpa izin. Artinya seseorang yang mengelola panti, menerima zakat dari donaturnya dan membelanjakan untuk kebutuhan yatim piatu dipantinya, terkena ancaman pasal ini. Dalam contoh diatas, pengelola dapat saja mendirikan LAZ, tetapi upaya yang dibutuhkan akan menguras sumberdaya panti yang sudah sangat terbatas.

Untuk itu misalnya, secara ideal panti harus memiliki sumber mandiri. Ketika mencoba mengalokasikan dana untuk kegiatan produktif (ekonomi) seperti warung/toko/usaha mikro, LAZ yang membantu akan dihadapkan pada Pasal 27 ayat 2 yang mengatur bahwa distribusi untuk tujuan produktif hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar lainnya terpenuhi.

Pengaturan ini memastikan keteraturan dan akuntabilitas, namun memberi ruang sangat sempit bagi kegiatan karitatif tradisional yang masih sangat diperlukan

ketika layanan sosial & pendidikan masih belum dapat dipenuhi pemerintah.

Hal tersebut juga mendorong pengelola LAZ untuk melestarikan kemiskinan dan ketidak berdayaan dhuafa dengan hanya menjadi penyedia layanan karitatif. Perubahan mustahiq menjadi muzakki yang hanya dapat ditopang oleh perbaikan taraf ekonomi, diserahkan kepada kebijakan ‘mekanisme pasar’ pemerintah yang nyata-nyata belum berpihak kepada kepentingan dhuafa.

Pasal-pasal seperti pasal 17 dan 38 seperti dijelaskan diatas adalah pasal multi tafsir dan sangat berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak berhubungan langsung dengan manfaat pengelolaan zakat. DSNI telah menerima informasi/pertanyaan dari muzakkinya tentang posisi DSNI terhadap BAZ Kota Batam dalam pengelolaan zakat.

Muzakki tersebut mendapat penjelasan dari petugas BAZ bahwa UU yang baru akan menempatkan LAZ sebagai unit pengumpul yang operasionalnya akan dikendalikan oleh BAZ. Maka, lebih baik baginya untuk menyalurkan zakat langsung ke BAZ karena pada akhirnya zakat yang diserahkan ke LAZ akan tetap disalurkan melalui BAZ.

Masalah Mendasar

Informasi seperti diatas yang terus mengalir, sesungguhnya mencerminkan masalah paling mendasar dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Masalah itu adalah anggapan prestasi hanya ditentukan oleh nominal pengumpulan.

Di Batam, bagi pengelola LAZ, kepindahan muzakki dari satu LAZ ke LAZ lain diterima sebagai sebuah hal yang wajar. Kepindahan tersebut lebih disebabkan tawaran program yang lebih pas dengan kebutuhan / minat muzakki. Ini mendorong LAZ untuk terus menerus berkreasi agar mustahiq memperoleh manfaat dari program yang dikemas untuk muzakki. Meskipun bersaing untuk nominal, prestasi diukur dari seberapa besar muzakki merasa puas dengan program yang dikemas. Jumlah akhir pengumpulan akan secara otomatis mengikuti.

Kasus muzakki DSNI diatas menyiratkan bahwa diantara pengelola masih terdapat perbedaan persepsi yang sangat tajam. Bila muzakki DSNI tersebut berpindah ke BAZ, maka DSNI akan memaksa dirinya berbenah dalam komunikasi dan program. Tapi dari sisi pandang pengelolaan zakat yang lebih luas, kepindahan tersebut mencerminkan kondisi yang lebih mengkhawatirkan.

Pertama, minimnya komunikasi dan edukasi. Muzakki masih belum mendapatkan informasi yang benar dan utuh. Ketidak tahuan menyebabkan muzakki tidak dapat menentukan pilihan peran strategisnya dengan tepat. Kedua, pengelolaan zakat masih dipahami sebagai sebatas urusan 'kekuatan'. Sediakan peraturan, tekankan 'nahi munkar', komunikasikan resiko atas ketidak patuhan, maka kesadaran akan timbul. Pendekatan ini diterima atas nama strategi mencapai tujuan.

Perbedaan ini sangat kontra produktif. Muzakki dan masyarakat akan melihat pengelolaan zakat sebagai 'rebutan lahan', edukasi dipahami sebagai 'strategi jualan'. Kepercayaan pada pengelola akan tetap rendah dan zakat akan disalurkan secara langsung untuk tujuan karitatif. Yang paling merasakan dampaknya adalah mustahiq, dhuafa.

F. Kesimpulan

Tantangan terberat bagi pengelola zakat sehubungan dengan UU 23 2011 adalah keluar dari zona nyaman. Bila kelak Judicial Review tidak menghasilkan keluaran yang diharapkan, pengelola LAZ harus menyesuaikan diri karena mereka tidak lagi dipangung utama pengelolaan zakat. BAZNAS Propinsi/Kabupaten/Kota yang kini didorong sebagai pemain

utama, harus dengan cepat memperkuat kompetensi dan kapabilitasnya.

Kesadaran itu menimbulkan ruang bagi proses komunikasi produktif diantara pengelola zakat, membuka wilayah-wilayah sinergi baru dan pada gilirannya menumbuhkan kesadaran muzakki karena manfaat pengelolaan yang dihasilkan dan dirasakan mustahiq.

Sekali lagi, untuk beberapa tahun kedepan, pengelolaan zakat di Indonesia masih akan berupa urusan kepercayaan pada pengelola, belum sampai pada kepatuhan terhadap penyelenggara pemerintahan.

REFERENSI.

Al-Qur'an

Hadits

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.